
RENCANA KERJA PERUBAHAN

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2017

**TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU YANG BAIK,
PROFESIONAL DAN HANDAL**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2014–2019 yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator outcome, indikator output, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017. Renja perubahan ini dibuat untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi good financial governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan dan aset pemerintah Provinsi Riau yang baik, profesional dan handal.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2017, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2014 – 2019.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



SYAHRIAL ABDI AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.3. Dasar Pertimbangan | 3 |
| 1.4. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II | 7 |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 21 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017..... | 21 |
| 3.2 Program dan Kegiatan | 22 |
| 3.2.1. Rencana Program | 22 |
| 3.2.2. Rencana Kegiatan | 23 |
| BAB IV : PENUTUP | 28 |
| LAMPIRAN | |



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah, kondisi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang lebih kecil dari proyeksi, pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, menyebutkan RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi (a) Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD; (b) penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD, dan (c) terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN 2017.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 S/D TRIWULAN II TAHUN 2017 |
| BAB III | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD |
| BAB IV | PENUTUP |

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 4 Agustus 2017

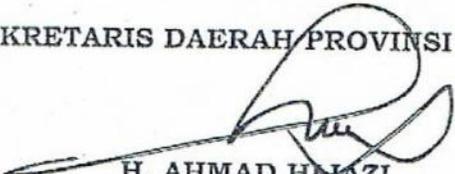
GUBERNUR RIAU,



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



H. AHMAD HNAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 40



PEMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien II/2 Telepon (0761) 33266 Fax. (0761) - 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR : Kpts. 26 /VIII/2017**

**TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
 RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah, kondisi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang lebih kecil dari proyeksi, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman perubahan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Riau Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518)
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2017 Tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.
- KEDUA : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar menjadikan Perubahan Rencana kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun perubahan kegiatan untuk tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 11 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



SYAHRIAL ABDI AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dimaksudkan terutama upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 dapat terwujud.

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD), adalah dokumen Perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2017.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2017 adalah:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2017.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Riau sampai dengan satu semester tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2017 dan diikuti dengan Perubahan Renja SKPD Tahun 2017. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2017. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (2016) tidak sesuai dengan estimasi saldo anggaran yang diperkirakan pada RKPD Provinsi Riau tahun 2017. Oleh karenanya selisih riil saldo anggaran tahun 2017 memerlukan penyesuaian APBD.

2. Adanya kegiatan pada tahun 2016 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2017 tetapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD Tahun 2017.
3. Rekomendasi tim Kordinasi dan Supervisi oleh KPK berdampak pada pergeseran skala prioritas pelaksanaan kegiatan dan pergeseran belanja kegiatan dalam rangka pengembangan sistim informasi keuangan daerah, inventarisasi aset, serta integrasi sistim informasi.
4. Adanya revisi standar belanja pegawai dan perjalanan dinas memerlukan penyesuaian-penyesuaian rincian belanja kegiatan.

1.4. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2017, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7).
14. Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019..
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Pertimbangan

1.4 Landasan Hukum

- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD 2017 sampai dengan Triwulan II

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017
- 3.2 Program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2016 S/D TRIWULAN II TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017

Hasil evaluasi program dan kegiatan BPKAD sampai dengan triwulan II tahun 2017, yang terdiri dari 9 program dan 41 kegiatan, realisasi keuangan sebesar Rp. 9.472.739.626 (29,30%) dan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 35%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kegiatan ini menganggarkan penyediaan dana untuk sarana surat-surat kedinasan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berupa materai, perangko, maupun jasa pengiriman surat. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya masih 19% dan realisasi fisik 19% yang telah didistribusikan baik itu ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun mitra kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini terdiri atas penyediaan dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional serta perizinan kendaraan dinas/operasional tersebut. Hingga Triwulan II realisasi keuangan sebesar 55,38% dan realisasi fisiknya 65%.
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan ini merupakan penyediaan dana bagi pelaksanaan jasa-jasa kebersihan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan ini adalah kegiatan tambahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, untuk

- mengakomodir penyediaan dana bagi pelaksanaan jasa-jasa kebersihan di lingkungan BPKAD Provinsi Riau apabila menempati gedung kantor tersendiri, hingga Triwulan II realisasi keuangan 49,85% dan realisasi fisik sebesar 100%
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bagi penyiapan pemanfaatan gedung kantor baru pada BPKAD, hingga Triwulan II realisasi keuangan 99% dan realisasi fisik sebesar 100%
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini merupakan sarana dalam penyediaan buku-buku peraturan dan perundang-undangan, standar dan pedoman, serta bahan bacaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, hingga Triwulan II realisasi keuangan 23,38% dan realisasi fisik sebesar 25%
 6. Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makan minum kegiatan penyiapan dan percepatan pelayanan/pelaksanaan tugas, serta fasilitasi makan dan minum tamu pimpinan dari instansi/SKPD lainnya di lingkup BPAKD Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangan sebesar 51,55% dan fisik sebesar 60%.
 7. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Kegiatan ini merupakan sarana penyedia dana bagi konsultasi dan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah lain sebagai bahan acuan dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi. Hingga Triwulan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan realisasi keuangan sebesar 51,12% dan realisasi fisik sebesar 60%.
 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD. Kegiatan ini merupakan sarana penyedia alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 48,09% dan realisasi fisik 50%.

9. Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD. Kegiatan ini merupakan sarana penyedia barang pengamanan dan pemeliharaan arsip, serta jasa tenaga penataan arsip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Hingga Triwulan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan penataan arsip Tahun Anggaran 2014 sebanyak 20% realisasi fisik sementara untuk realisasi keuangan masih 25%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor BPKAD sebagai SKPD yang baru terbentuk. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 81,03% dan realisasi fisik 96%.
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan ini merupakan penyedia dana bagi belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor baru pada BPKAD. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 39,25% dan realisasi fisik sudah mencapai 47%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan ini merupakan penyedia dana bagi pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor sebagai sarana prasarana pelaksana tugas kegiatan. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 38% dan realisasi fisik sudah mencapai 40%.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset. Kegiatan ini merupakan pemeliharaan genset kantor. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 20,88% dan realisasi fisik sudah mencapai 41,67%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor. Kegiatan ini merupakan pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor. Hingga

Triwulan II realisasi keuangan 93,24% dan realisasi fisik sudah mencapai 100%.

III. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini merupakan meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dipandang perlu dilakukan secara terus menerus pembekalan terhadap pengenalan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan yang seringkali mengalami perubahan baik dari aspek pengaturan kebijakan maupun aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan. Hingga Triwulan II, kegiatan ini belum ada realisasi.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program ini bertujuan meningkatkan laporan kinerja dan keuangan SKPD, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan ini merupakan penyedia dana bagi pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja, Renstra, Renja, Penyusunan LAKIP, serta konsultasi eksternal dan koordinasi internal perencanaan dan program. Hingga Triwulan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun laporan sebesar 45% dari yang direncanakan sebelumnya. Untuk realisasi keuangannya yaitu 2,95% dan realisasi fisiknya 16,67%.

2. Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penunjang penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hingga Triwulan II, kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan rutin pembayaran gaji Tenaga Akuntansi, untuk realisasi keuangannya 13,22% dan realisasi fisiknya 25%.

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. Kegiatan ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaporan pelaksanaan belanja daerah dan refrensi bagi perkiraan realisasi anggaran belanja daerah. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 27,68% dan realisasi fisiknya 50%.
- V. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga. Kegiatan ini merupakan penyusunan pedoman penetapan harga dalam pelaksanaan penggunaan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada APBD Perubahan tahun 2017 kegiatan ini di drop karena bukan merupakan tupoksi BPKAD.
 2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini merupakan sosialisasi terhadap paket-paket peraturan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi aparatur BPKAD dalam rangka pengembangan wawasan dan pemahaman dalam perkembangan dan perubahan regulasi serta implementasinya. Hingga triwulan II realisasi keuangan kegiatan ini adalah 30,64% dan realisasi fisiknya 40%.
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka member dukungan jasa dan pelayanan yang memadai bagi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan agar terlaksana dengan lancar dan tepat waktu dalam rangka memberikan pelayanan prima. Hingga triwulan II realisasi keuangan telah mencapai 30,71% dan untuk realisasi fisiknya sebesar 43,49%.
 4. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan SDM penatausahaan laporan BUD dan memelihara perangkat kerja pengelolaan Kas Daerah agar menyajikan data-data dan laporan kas daerah yang tersusun sebagaimana mestinya. Hingga

- triwulan II realisasi keuangannya 32,95% dan realisasi fisiknya 85%.
5. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengumpulan dan rekonsiliasi data penerimaan atau data PAD dan koordinasi DAU selama 1 tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hingga triwulan II realisasi keuangan 28,27% dan realisasi fisik 35%.
 6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. Kegiatan ini bertujuan menyusun PERDA tentang APBD dan PERGUB tentang penjabaran APBD Provinsi Riau dengan cara melaksanakan rapat-rapat pembahasan yang melibatkan TAPD dan POKJA penyusunan Anggaran, cetak buku PERDA dan PERGUB, Entry data SKPD, Entry data anggaran kas SKPD serta kegiatan lain yang mendukung proses dalam penyusunan APBD. Hingga triwulan II realisasi keuangannya sebesar 18,83% dan realisasi fisiknya 50%.
 7. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD. Kegiatan ini bertujuan menyusun PERDA tentang APBD-P dan PERGUB tentang penjabaran APBD-P Provinsi Riau dengan cara melaksanakan rapat-rapat pembahasan yang melibatkan TAPD dan POKJA penyusunan Anggaran, cetak buku PERDA dan PERGUB, Entry data SKPD, Entry data anggaran kas SKPD serta kegiatan lain yang mendukung proses dalam penyusunan APBD-P. Hingga triwulan II realisasi keuangannya sebesar 1,69% dan realisasi fisiknya 2%.
 8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini merupakan proses penghimpunan laporan-laporan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh SKPD dalam penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Penyusunan

- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hingga triwulan II realisasi keuangan 19,58% sedangkan realisasi fisik 37,78%.
9. Kegiatan Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan pemberian fasilitasi, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD. Hingga triwulan II realisasi keuangan kegiatan ini telah mencapai sebesar 38,42% sedangkan realisasi fisiknya 80%.
 10. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD. Kegiatan ini merupakan penunjang implementasi aplikasi SIPKD yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 18,10% dan realisasi fisiknya sebesar 85,74%.
 11. Kegiatan Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK- BLUD. Kegiatan ini merupakan fasilitasi pembinaan kepada kab/kota dalam membentuk BLUD. Pada APBD Perubahan tahun 2017 kegiatan ini di drop.
 12. Kegiatan Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah. Kegiatan ini merupakan fasilitasi dalam menyusun regulasi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 44,40% dan realisasi fisiknya 50%.
 13. Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini merupakan perwujudan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Hingga triwulan II belum ada realisasi keuangan.
 14. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini berupa pengasuransian aset/barang milik daerah meliputi bangunan dan kendaraan. Hingga triwulan II belum ada realisasi.
 15. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu

- bentuk pengamanan aset milik daerah. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 44,69% dan realisasi fisiknya 50%.
16. Kegiatan Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini berbentuk tindakan untuk menentukan nilai aset pemerintah Provinsi Riau secara update berdasarkan data inventaris aset. Data tersebut dapat digunakan untuk tindakan pelelangan ataupun penghapusan aset. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 12,62% sementara realisasi fisiknya telah mencapai 20%.
 17. Kegiatan Pemeliharaan Aset Daerah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk pemeliharaan Aset Daerah agar memiliki nilai manfaat. Hingga triwulan II realisasi keuangannya telah mencapai 23,75% dan realisasi fisiknya 30%.
 18. Kegiatan Inventarisasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan perwujudan pendataan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan pelaksanaan rekonsiliasi data aset di seluruh SKPD. Hingga triwulan II realisasi keuangannya sebesar 53,40% dan realisasi fisiknya 55%.
 19. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelatihan bagi aparatur pengurus barang maupun penyimpan barang di SKPD se Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangan belum ada sementara realisasi fisik 25%.
 20. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penatausahaan yang handal dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 55,66% dan realisasi fisiknya 60%.
 21. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna revisi peraturan

Gubernur tentang pengelolaan barang milik daerah berdasarkan perubahan Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara.

Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini di drop

22. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahun dalam rangka evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota. Hingga Triwulan II realisasi keuangan 24,93% dan realisasi fisik 30%.

VI. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berbentuk rapat-rapat evaluasi Ranperda tentang APBD Kab/Kota dan Ranperda Perubahan tentang APBD Kab/Kota yang disertai penjabarannya. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 36,03% dan realisasi fisiknya 50%.
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Kegiatan ini berbentuk rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bagi pejabat/aparatur pengelolaan keuangan daerah kab/kota se Provinsi Riau. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya telah mencapai 39,47% dan realisasi fisiknya 45%.

VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program ini bertujuan untuk memenuhi peningkatan system pengawasan internal dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan KHD, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan menertibkan pengawasan dan pembinaan bagi barang milik daerah. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 7,36% dan realisasi fisknya 20%.

VIII. Program Pengembangan Data/Informasi, Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin ketersediaan data dasar dan informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi/expose BPKAD Provinsi Riau kepada publik melalui pameran tahunan (Riau Expo). Pada APBD tahun 2017 kegiatan ini di drop.

IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kegiatan ini bertujuan supaya terkendalinya program-program pembangunan daerah dan menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hingga Triwulan II realisasi keuangannya 16,94% dan realisasi fisiknya 25%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TRIWULAN II TAHUN 2017

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target Kinerja Renja Tahun 2017 | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2017 | | Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017 | |
|---------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | Realisasi Kinerja Renja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja | Realisasi Target | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=(5+7) | 10=(9/4) |
| 3 00 02 02 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik | | | | | | | |
| | 001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 2000 | 3500 | 2000 | 220 | 0.11 | 3,720 | 1.86 |
| | 006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 35 | 24 | 10 | 1 | 0.1 | 25 | 0.71 |
| | 008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 20 | 5 | 12 | 8 | 0.67 | 13 | 0.65 |
| | 012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik | 32 | 58 | 12 | 4 | 0.33 | 62 | 1.94 |
| | 015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 300 | 360 | 12 | 12 | 0.5 | 366 | 1.22 |
| | 017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 4000 | 6600 | 9900 | 3465 | 0.35 | 10,065 | 2.51625 |
| | 018 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 600 | 1230 | 400 | 152 | 0.38 | 1,382 | 2.30 |
| | 024 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD | Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD | 550 | 88 | 55 | 20 | 0.36 | 108 | 0.20 |
| | 025 Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD | Jumlah penataan pengelolaan arsip SKPKD | 80000 | 39000 | 20000 | 1102 | 0.0551 | 40,102 | 0.50 |
| 3 00 02 02 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja | | | | | | | |
| | 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 20 | 0 | 50 | 48 | 0.96 | 48 | 2.40 |
| | 011 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 20 | 10 | 20 | 17 | 0.85 | 27 | 0.20 |
| | 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.24 |
| | 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 48 | 133 | 20 | 6 | 0.30 | 139 | 2.90 |
| | 062 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset | Jumlah genset yang dipelihara | 3600 | 1200 | 12 | 5 | 0.42 | 1,205 | 0.33 |
| | 078 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor | Jumlah jaringan gedung kantor yang dipelihara | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | 4 | 0.80 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 1 | 1 | - | | 0 | 1 | 1.00 |
| 3 00 02 02 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur sipil negara | | | | | | | |
| | 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 200 | 300 | - | 0 | 0.00 | 300 | 1.50 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target Kinerja Renja Tahun 2017 | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2017 | | Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017 | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| | | | | | | Realisasi Kinerja Renja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja | Realisasi Target | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=(5+7) | 10=(9/4) | | | | | | |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal. | Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 20 | 60 | 10 | 0 | 0.00 | 60 | 3.00 |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketepatan penyampaian laporan | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 13 | 6 | 1 | 0.17 | 14 | 2.33 |
| | | | | | 013 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun | Jumlah SDM akuntansi yang ditingkatkan | 114 | 214 | 100 | 100 | 1.00 | 314 | 2.75 |
| | | | | | 014 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | 49 | 51 | 2 | 1 | 0.50 | 52 | 1.06 |
| 3 | 00 | 01 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | Program Pengembangan Data / Informasi | Persentase ketersediaan data/informasi | Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan | 20 | 100 | 20 | 0 | 0.00 | 100 | 5.00 |
| 3 | 00 | 02 | 015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah BUMD sehat | Penyusunan Analisa Standar Belanja | 5 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 13.20 |
| | | | | | 002 | Penyusunan Standar Satuan Harga | Jumlah dokumen Pergub ASB | jenis standar satuan harga yang disusun | 200 | 550 | 200 | 0 | 0.00 | 550 | 2.75 |
| | | | | | 014 | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | 300 | 540 | 300 | 0 | 0.00 | 540 | 1.80 |
| | | | | | 018 | Revaluasi Appraisal Aset/Barang Daerah | Jumlah persentase penghapusan barang milik daerah | Jumlah persentase penghapusan barang milik daerah | 1 | 1 | - | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | | | | | 021 | Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya | 56 | 60 | 57 | 57 | 1.00 | 117 | 2.09 |
| | | | | | 023 | Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kas daerah | Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kas daerah | 50 | 83 | 50 | 50 | 1.00 | 133 | 2.66 |
| | | | | | 024 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat | Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat | 12 | 36 | 12 | 2 | 0.17 | 38 | 3.17 |
| | | | | | 026 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran APBD yang disusun | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran APBD yang disusun | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 |
| | | | | | 027 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target Kinerja Renja Tahun 2017 | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2017 | | Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017 | | |
|------|---|---|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------|
| | | | | | | Realisasi Kinerja Renja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja | Realisasi Target | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=(5+7) | 10=(9/4) | |
| | 028 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 |
| | 029 | Penyediaan Tenaga Dukungan Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau | Jumlah tenaga akuntansi kompeten | 46 | 150 | 120 | 120 | 1.00 | 270 | 5.87 |
| | 030 | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | 10 | 49 | 10 | 10 | 1.00 | 59 | 5.90 |
| | 032 | Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek | 80 | 144 | 80 | 0 | 0.00 | 144 | 1.80 |
| | 033 | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah regulasi yang disusun, jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi | 130 | 158 | 100 | 100 | 1.00 | 258 | 1.98 |
| | 034 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daeah | Jumlah peserta pelatihan SIPKD | 20 | 10 | - | 0 | 0.00 | 10 | 0.50 |
| | 035 | Penyusunan Revisi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah draft pergub sisdur | 45 | 41 | - | 0 | 0.00 | 41 | 0.91 |
| | 036 | Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah buku RKBMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | 150 | 300 | 75 | 0 | 0.00 | 300 | 2.00 |
| | 037 | Pembuatan Alas Hak dan Sertifikat Tanah Milik Pemprov Riau | Jumlah dokumen alas hak dan sertifikat tanah milik Pemprov Riau | 1 | 1 | - | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | 038 | Rekonsiliasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah data aset | 1 | 1 | - | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | 039 | Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset milik Pemprov. Riau | Jumlah buku sisdur aset dan peserta sosialisasi | 100 | 2 | - | 0 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| | 040 | Peningkatan Manajemen Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta sosialisasi manajemen aset milik | 100 | 100 | - | 0 | 0.00 | 100 | 1.00 |
| | 041 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang diasuransikan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | 042 | Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota | 12 | 12 | - | 0 | 0.00 | 12 | 1.00 |
| | 043 | Fasilitasi Penyelesaian Aset Daerah yang Bermasalah | Jumlah dokumen penyelesaian aset daerah yang bermasalah | 1 | 1 | - | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | 044 | Pengamanan Aset Milik Daerah | Jumlah aset yang diamankan | 40 | 34 | 20 | 10 | 0.50 | 44 | 1.10 |
| | 124 | Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah jenis aset yang dinilai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| | 125 | Pemeliharaan Aset Provinsi Riau | Jumlah jenis aset yang dipelihara | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1.20 |
| | 128 | Inventarisasi Data Aset | Jumlah laporan aset yang diinventaris | 46 | 86 | 1 | 1 | 1.00 | 87 | 1.89 |
| | 130 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya | 90 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target Kinerja Renja Tahun 2017 | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2017 | | Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017 | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|-----|------|
| | | | | | | Realisasi Kinerja Renja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja | Realisasi Target | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=(5+7) | 10=(9/4) | | | | |
| | 141 | Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta bimtek | 200 | 400 | 200 | 100 | 0.50 | 500 | 2.50 | | | |
| | 142 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah pergub revisi Sisdur PKD | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.00 | 150 | 1.00 | | | |
| | 143 | Pelaksanaan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang daerah | Jumlah dokumen laporan TGR | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1.80 | | | |
| | 144 | Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | Jumlah kabupaten/Kota yang dibina, jumlah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi | 12 | 12 | 12 | 2 | 0.17 | 14 | 1.17 | | | |
| 3 | 00 | 02 | 016 | Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu | | | | | | | | |
| | | | | 007 | Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah ranperda APBD dan perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi | 24 | 48 | 24 | 7 | 0.29 | 55 | 2.29 |
| | | | | 009 | Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | Jumlah dokumen rapat koordinasi keuda | 2 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
| | | | | 010 | Penyusunan Profil Keuangan Daerah | Jumlah buku profil keuangan daerah | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 1.00 |
| | | | | 013 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina | 120 | 220 | 120 | 120 | 1.00 | 340 | 2.83 |
| | | | | 014 | Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah Kab/Kota | Jumlah peserta rakor pengelolaan aset daerah | 100 | 100 | - | 0 | 0.00 | 100 | 1.00 |
| 5 | 00 | 01 | 015 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan | | | | | | | | |
| | | | | 031 | Pelaksanaan Operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Frekuensi penertiban penggunaan barang milik daerah | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 |
| 3 | 00 | 01 | 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas | | | | | | | | |
| | | | | 016 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Jenis dokumen yang disusun | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 |

Untuk melihat hasil Evaluasi Renja BPKAD pertriwulan dapat juga kita lihat pada lampiran tabel 2.2 :

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi informasi;
4. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai;
5. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset daerah kabupaten/kota;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;
4. Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Terasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota.

3.2. Program dan Kegiatan

3.2.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2017, adalah sebagai berikut:

1. Program Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
2. Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
3. Program Belanja Tidak Terduga;
4. Program Bantuan Hibah BOS;
5. Program Bantuan Hibah Lainnya;
6. Program Bantuan Sosial;
7. Program Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
11. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

15. Program Pengembangan Data/Informasi;
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan Perubahan BPKAD T.A 2017 tidak sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

- h. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD;
 - j. Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan :
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual;
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja;
 - b. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
 - c. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- e. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
- f. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah;
- g. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- h. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- i. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Kegiatan Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau;
- k. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD;
- l. Kegiatan Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD;
- m. Kegiatan Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah;
- n. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah;
- o. Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- p. Kegiatan Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset Milik Pemprov Riau;
- q. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah;
- r. Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah;
- s. Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- t. Kegiatan Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau;

- u. Kegiatan Pemeliharaan Aset Pemerintah Provinsi Riau;
 - v. Kegiatan Inventarisasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau;
 - w. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau;
 - x. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - y. Kegiatan Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
 - z. Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah;
 - aa. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - bb. Kegiatan Pengelolaan Aset Provinsi Riau
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota:
- a. Kegiatan Evaluasi Ranperda APBD Kab/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penyusunan Profil Keuangan Daerah;
 - c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - d. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota;
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau.
9. Program Pengembangan Data/Informasi
- a. Kegiatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

LAMPIRAN

I

| NO | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (OutPut) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (Realisasi 2015 + Realisasi 2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg di evaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja PD yang Di Evaluasi Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan Renja PD Tahun 2017 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|--|--|--------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----|-----|-------------|---|---------------|--|----|--|----------------|--|---------|--------------------------|-------------|------------------|---------|--|--|
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | | 14 = 6 + 12 | | | | 15 = 14/5 x 100% | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | |
| III | 3.00.02.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kedisiplinan aparaturnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | | 500.000.000 | 365.210.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365.210.000 | - | - | BPKAD | | | | | |
| 1 | 3.00.02.03.001 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 100 persen | 500.000.000 | 365.210.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 300 | 365.210.000 | 300,00% | 73,04% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| IV | 3.00.02.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 60.000.000 | 15.900.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.900.000 | - | - | BPKAD | | | | | |
| 1 | 3.00.02.05.001 | Pendidikan dan Pelatihan Format. | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 50 orang | 60.000.000 | 15.900.000 | 10 orang | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 15.900.000 | 120,00% | 26,50% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| V | 3.00.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Opini BPK | | 9.556.000.000 | 2.120.909.929 | 987.192.300 | 13.755.000 | 143.977.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.278.642.829 | - | - | BPKAD | | | | | |
| 1 | 3.00.02.06.001 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 100 persen | 959.000.000 | 130.451.000 | 6 dokumen | 81.170.000 | 1 | 2.400.000 | - | - | - | - | 1 | 2.400.000 | 16,67 | 2,96 | - | - | 14 | 172.851.000 | 14,00% | 18,02% | | | | | | |
| 2 | 3.00.02.06.013 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah SDM Akuntansi Akrua | 100 persen | 6.000.000.000 | 214 orang | 1.406.947.414 | 100 orang | 660.403.000 | - | 11.355.000 | 100 | 75.983.900 | - | 100 | 87.338.900 | 100,00 | 13,23 | - | - | 314 | 1.494.286.314 | 314,00% | 24,90% | | | | | | |
| 3 | 3.00.02.06.014 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 100 persen | 2.597.000.000 | 51 SKPD | 543.511.515 | 2 laporan | 245.619.300 | 1 | - | - | 67.994.000 | - | 1 | 67.994.000 | 50,00 | 27,68 | - | - | 52 | 611.505.515 | 52,00% | 23,55% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,56 | 14,62 | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| VI | 3.00.01 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | 60.000.000 | | | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 | BPKAD | | | | |
| 1 | 3.00.01.15.06 | Program Pengembangan Data / Informasi | Terpublikasinya Data dan Informasi | | 60.000.000 | | | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 108.000.000 | 1 | 180,00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| VII | 3.00.02 | KEUANGAN | | | 126.066.744.000 | 37.456.420.511 | 22.993.886.800 | 2.668.035.390 | 3.105.797.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.230.252.992 | - | - | BPKAD | | | | | |
| 1 | 3.00.02.015.001 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Jenis ASB yang disusun | 98 persen | 4.480.000.000 | 66 orang | 887.172.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 887.172.750 | 66,84% | 19,80% | | | | | | |
| 2 | 3.00.02.015.002 | Penyusunan Standar Satuan Harga | Jenis standar satuan harga yang disusun | 100 persen | 4.000.000.000 | 550 buku | 993.064.500 | 200 buku | 500.050.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 993.064.500 | 550,00% | 24,83% | | | | | | |
| 3 | 3.00.02.015.014 | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | 100 persen | 4.623.000.000 | 540 peserta | 763.520.800 | 300 peserta | 428.215.650 | - | 12.154.000 | - | 119.033.800 | - | - | 131.187.800 | - | 30,64 | - | - | 540 | 894.708.600 | 540,00% | 19,35% | | | | | | |
| 4 | 3.00.02.015.018 | Revaluasi Appraisal Aset/Barang Daerah | Jumlah BMD yang dinilai | 100 persen | 1.250.000.000 | 1 tahun | 209.960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 209.960.000 | 1,00% | 16,80% | | | | | | |
| 5 | 3.00.02.015.023 | Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah tenaga administrasi dan pengelolaan keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya | 100 persen | 3.000.000.000 | 60 honorer | 3.737.459.338 | 57 Tenaga SKPKD | 3.083.850.000 | 57 | 589.221.631 | - | 357.922.800 | - | 57 | 947.144.431 | 100,00 | 30,71 | - | - | 117 | 4.684.603.769 | 117,00% | 156,15% | | | | | | |
| 6 | 3.00.02.015.023 | Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kasda | 100 persen | 4.890.000.000 | 83 orang | 1.251.568.250 | 50 orang | 488.513.000 | - | 76.741.900 | 50 | 84.228.545 | - | 50 | 160.970.445 | 100,00 | 32,95 | - | - | 133 | 1.412.538.695 | 133,00% | 28,89% | | | | | | |
| 7 | 3.00.02.015.024 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Persentase dan rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat | 12 laporan bulanan | 4.280.000.000 | 36 laporan bulanan | 1.010.029.449 | 12 laporan bulanan | 479.800.000 | 2 | 39.235.000 | - | 96.383.200 | - | 2 | 135.618.200 | 16,67 | 28,27 | - | - | 38 | 1.145.647.649 | 316,67% | 26,77% | | | | | | |
| 8 | 3.00.02.015.026 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 100 persen | 10.000.000.000 | 4 perda dan pergub | 2.626.022.050 | 2 Raperda dan Rapergub | 1.828.109.950 | - | 46.138.200 | 1 | 298.149.000 | - | 1 | 344.287.200 | 50,00 | 18,83 | - | - | 5 | 2.970.309.250 | 5,00% | 29,70% | | | | | | |
| 9 | 3.00.02.015.027 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 100 persen | 10.000.000.000 | 2 perda dan pergub | 2.050.070.600 | 2 Raperda dan Rapergub | 1.722.634.950 | - | - | - | 29.164.000 | - | - | 29.164.000 | - | 1,69 | - | - | 2 | 2.079.234.600 | 2,00% | 20,79% | | | | | | |
| 10 | 3.00.02.015.028 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 100 persen | 4.243.000.000 | 2 perda dan pergub | 1.038.938.618 | 1 Raperda dan Rapergub | 685.602.400 | 1 | 12.331.247 | - | 121.925.700 | - | 1 | 134.256.947 | 100,00 | 19,58 | - | - | 3 | 1.173.195.565 | 3,00% | 27,65% | | | | | | |

L A M P I R A N

II

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2017 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2018 | | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|----------------|--|---|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Jumlah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 00 3 02 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 50 unit | 50 unit | 1.178.010.550,00 | 1.054.485.000,00 | (123.525.550,00) | APBD | APBD-P | 50 unit | 1.159.933.500,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 02 009 | Pengadaan Peralatan Gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 20 unit | 20 unit | 715.991.000,00 | 356.171.715,00 | (359.819.285,00) | APBD | APBD-P | 20 unit | 391.788.886,50 | | BPKAD |
| 3 00 3 02 028 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 20 unit | 50 unit | 175.745.000,00 | 175.745.000,00 | - | APBD | APBD-P | 50 unit | 193.319.500,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 02 062 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset | Jumlah pemeliharaan genset | Jumlah genset yang dipelihara | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 1 unit | 2 unit | 97.500.000,00 | 67.500.000,00 | (30.000.000,00) | APBD | APBD-P | 2 unit | 74.250.000,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 02 078 | Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan jaringan gedung kantor | Jumlah jaringan gedung kantor yang dipelihara | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 5 sarana jaringan | 5 sarana jaringan | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | - | APBD | APBD-P | 5 sarana jaringan | 104.500.000,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 05 | PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur | Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara | | | | | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | | | | 27.500.000,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 05 001 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan keuangan daerah | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Aparatur di lingkungan BPKAD Provinsi Riau | Aparatur di lingkungan BPKAD Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 10 orang | 10 orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | APBD | APBD-P | 10 orang | 27.500.000,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 06 | PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan capaian kinerja yang terukur serta tepat sasaran | Persentase ketepatan penyampaian laporan | | | | | | | 987.192.300,00 | 925.544.000,00 | (61.648.300,00) | | | | 1.018.098.400,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 06 001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | Jumlah dokumen capaian kinerja, renstra, renja, RKA, dan laporan kinerja | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun | - | - | Pekanbaru, Luar Daerah | Pekanbaru, Luar Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 81.170.000,00 | 48.316.000,00 | (32.854.000,00) | APBD | APBD-P | 6 dokumen | 53.147.600,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 06 013 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah SDM akuntansi akrua | Jumlah SDM akuntansi yang dilibatkan | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 100 orang | 100 orang | 660.403.000,00 | 660.403.000,00 | - | APBD | APBD-P | 100 orang | 726.443.300,00 | | BPKAD |
| 3 00 3 06 014 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan keuangan TW/SM tepat waktu | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 2 laporan | 3 dokumen | 245.619.300,00 | 216.825.000,00 | (28.794.300,00) | APBD | APBD-P | 3 dokumen | 238.507.500,00 | | BPKAD |
| 3 00 02 15 | PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah | Jumlah BUMD sehat | | | | | | | 22.993.886.800,00 | 21.784.418.935,00 | (1.209.467.865,00) | | | | 23.962.860.828,50 | | BPKAD |
| 3 00 02 15 002 | Penyusunan standar satuan harga | Jumlah buku pergub standar satuan harga | jenis standar satuan harga yang disusun | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 200 buku | - | 500.050.000,00 | 0,00 | (500.050.000,00) | APBD | APBD-P | - | 0,00 | | BPKAD |
| 3 00 02 15 014 | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 300 peserta | 350 orang | 428.215.650,00 | 361.215.650,00 | (67.000.000,00) | APBD | APBD-P | 350 orang | 397.337.215,00 | | BPKAD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2017 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2018 | | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|------------------------------------|----|--------------------|--|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------|--|-------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Jumlah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | | | | | a/b/c | 1/2/3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 021 | Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah. | Jumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPKD | Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kas daerah | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 57 tenaga SKPKD | 48 tenaga SKPKD | 3.083.850.000,00 | 3.063.850.000,00 | (20.000.000,00) | APBD | APBD-P | 48 tenaga SKPKD | 3.370.235.000,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 023 | Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah peserta up-grading kemampuan pengelolaan kasda | Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 50 orang | 50 orang | 488.513.000,00 | 427.479.300,00 | (61.033.700,00) | APBD | APBD-P | 50 orang | 470.227.230,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 024 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Jumlah data rekonsiliasi kas daerah | Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat | Aparatur Pengelola Data Penerimaan Daerah | Aparatur Pengelola Data Penerimaan Daerah | Pekanbaru | Pekanbaru | 12 Laporan bulanan | 24 Laporan bulanan | 479.800.000,00 | 415.387.000,00 | (64.413.000,00) | APBD | APBD-P | 24 Laporan bulanan | 456.925.700,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 026 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perda dan Pergub Penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran APBD yang disusun | Pengelola Anggaran Daerah Provinsi Riau | Pengelola Anggaran Daerah Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 2 raperda, 2 rapergub | 2 dokumen | 1.828.109.950,00 | 1.790.109.950,00 | (38.000.000,00) | APBD | APBD-P | 2 dokumen | 1.969.120.945,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 027 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda dan Pergub perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 2 raperda, 2 rapergub | 2 dokumen | 1.722.634.950,00 | 1.760.134.950,00 | 37.500.000,00 | APBD | APBD-P | 2 dokumen | 1.936.148.445,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 028 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. | Jumlah Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 2 raperda, 2 rapergub | 2 dokumen | 685.602.400,00 | 661.602.400,00 | (24.000.000,00) | APBD | APBD-P | 2 dokumen | 727.762.640,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 029 | Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau | Jumlah tenaga akuntansi Provinsi Riau | Jumlah tenaga akuntansi kompeten | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 120 orang | 91 orang | 4.030.376.000,00 | 4.004.311.000,00 | (26.065.000,00) | APBD | APBD-P | 91 orang | 4.404.742.100,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 030 | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD | Jumlah aplikasi dan admin SIKD | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | SKPD Provinsi Riau dan institusi terkait | SKPD Provinsi Riau dan institusi terkait | Pekanbaru | Pekanbaru | 1 aplikasi, 8 orang | 1 aplikasi, 8 orang | 2.832.630.000,00 | 2.918.492.000,00 | 85.862.000,00 | APBD | APBD-P | 1 aplikasi, 8 orang | 3.210.341.200,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 032 | Persiapan, Pematapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD | Jumlah peserta bimtek PPK BLUD | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek | Manajemen RS dan TAPD Provinsi dan Kabupaten / Kota | Manajemen RS dan TAPD Provinsi dan Kabupaten / Kota | Pekanbaru | Pekanbaru | 80 peserta | - | 201.244.000,00 | 0,00 | (201.244.000,00) | APBD | APBD-P | - | 0,00 | | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 15 | 033 | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi regulasi keuangan daerah | Jumlah regulasi yang disusun, jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 100 peserta | 200 orang | 387.421.600,00 | 387.421.600,00 | - | APBD | APBD-P | 200 orang | 426.163.760,00 | | BPKAD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2017 | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2018 | | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|----------------|---|--|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Jumlah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | Sebelum perubahan | Sesudah perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 00 02 15 036 | Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah buku | Jumlah buku RKBMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 75 buku | 75 buku | 301.421.500,00 | 321.421.500,00 | 20.000.000,00 | APBD | APBD-P | 75 buku | 353.563.650,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 041 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah dokumen asuransi aset | Jumlah BMD yang diasuransikan | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 1 dokumen | 1 dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | APBD | APBD-P | 1 dokumen | 5.500.000,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 044 | Pengamanan Aset Milik Daerah | Jumlah pengamanan aset | Jumlah aset yang diamankan | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 20 lokasi | 40 unit | 1.367.194.000,00 | 1.367.194.000,00 | - | APBD | APBD-P | 40 unit | 1.503.913.400,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 124 | Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah aset yang terdokumentasi | Jumlah jenis aset yang dinilai | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 1 buku | 5 jenis | 760.015.250,00 | 760.015.250,00 | - | APBD | APBD-P | 5 jenis | 836.016.775,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 125 | Pemeliharaan Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah pemeliharaan aset | Jumlah jenis aset yang dipelihara | - | - | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 2 lokasi | 5 lokasi | 1.017.304.000,00 | 1.036.287.835,00 | 18.983.835,00 | APBD | APBD-P | 5 lokasi | 1.139.916.618,50 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 128 | Inventarisasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah data aset | Jumlah laporan aset yang diinventaris | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 1 dokumen | 2 laporan | 815.798.000,00 | 840.798.000,00 | 25.000.000,00 | APBD | APBD-P | 2 laporan | 924.877.800,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 130 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta pelatihan | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya | Pengurus Barang SKPD | Pengurus Barang SKPD | Pekanbaru | Pekanbaru | 90 peserta | 90 peserta | 1.167.834.000,00 | 1.066.342.000,00 | (101.492.000,00) | APBD | APBD-P | 90 peserta | 1.172.976.200,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 141 | Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta | Jumlah peserta bimtek | - | - | Pekanbaru | Pekanbaru | 200 peserta | 200 peserta | 374.170.000,00 | 333.614.000,00 | (40.556.000,00) | APBD | APBD-P | 200 peserta | 366.975.400,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 142 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah pergub revisi Sisdur PKD | Jumlah pergub revisi Sisdur PKD | SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 150 buku | - | 252.960.000,00 | 0,00 | (252.960.000,00) | APBD | APBD-P | - | 0,00 | | BPKAD | |
| 3 00 02 15 144 | Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang pertanggungjawaban | Jumlah kabupaten/Kota yang dibina, jumlah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi | Kabupaten / Kota Se- Provinsi Riau | Kabupaten / Kota Se- Provinsi Riau | Provinsi Riau | Provinsi Riau | 12 SK Gubernur | 12 SK Gubernur | 263.742.500,00 | 263.742.500,00 | - | APBD | APBD-P | 12 SK Gubernur | 290.116.750,00 | | BPKAD | |
| 3 00 3 16 | PROGRAM ; PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP | Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP- APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu | | | | | | | 986.172.000,00 | 961.172.000,00 | (25.000.000,00) | APBD | APBD-P | | 1.057.289.200,00 | | BPKAD | |
| 3 00 3 16 007 | Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi APBD/APBD Kab/Kota | Jumlah ranperda APBD dan perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi | Kabupaten / Kota se- Provinsi Riau | Kabupaten / Kota se- Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 24 SK | 24 SK | 446.806.000,00 | 446.806.000,00 | - | APBD | APBD-P | 24 SK | 491.486.600,00 | | BPKAD | |
| 3 00 3 16 013 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta rakor dan sosialisasi | Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina | Aparatur Pengelola keuangan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | Aparatur Pengelola keuangan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 120 orang | 12 kab/kota | 539.366.000,00 | 514.366.000,00 | (25.000.000,00) | APBD | APBD-P | 12 kab/kota | 565.802.600,00 | | BPKAD | |

